

Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat Di Kelurahan Punia Kota Mataram NTB

Safirah Andayani¹, Ilham Zitri², Darmansyah³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Mataram

Corresponding Author: Ilham.Zitri@Ummat.ac.id

Kata Kunci:

Akuntabilitas;
Transparansi;
Kepercayaan
Masyarakat

Abstrak: Di Indonesia, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan penyelenggara negara cenderung mengalami kemunduran bahkan ada yang menyatakan mereka tidak perlu lagi adanya pemerintahan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yaitu karena adanya kesenjangan ekspektasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah dengan kinerja pemerintah sesungguhnya. menyatakan bahwa salah satu cara untuk mencapai kepuasan masyarakat adalah penyediaan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat yang dapat dilakukan dengan membuat laporan keuangan dan kinerja pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh akuntabilitas dan transparansi dana desa terhadap tingkat kepercayaan masyarakat di Punia Kota Mataram NTB. Penelitian ini dilakukan karena tingkat kepercayaan masyarakat semakin menurun terhadap pemerintah desa dikarenakan tidak adanya keterbukaan dari pemerintah kepada masyarakat terkait dana yang di dapat oleh desa setiap tahunnya. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian yang berbasis pada data. Data dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner dan observasi. Metode yang digunakan adalah uji validitas reabilitas dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi dana desa mempengaruhi tingkat Kepercayaan masyarakat.

Keyword:

Accountability;
Transparency;
Public Trust.

Abstract: In Indonesia, people's trust in the government and state administrators tends to decline and some even state that they no longer need a government. There are several factors that cause a decrease in public trust in the government, namely due to the gap in public expectations of government performance with actual government performance. state that one way to achieve public satisfaction is to provide the information needed by the community which can be done by making government financial and performance reports. This study aims to determine how the influence of accountability and transparency of village funds on the level of public trust in Punia, Mataram City, NTB. This research was conducted because the level of public trust in the village government has decreased due to the absence of openness from the government to the community regarding the funds that the village receives every year. In this study using quantitative research methods with the type of research based on data. Data was collected by distributing questionnaires and observation. The method used is to test the validity, reliability and hypothesis testing. The result of this study indicate that accountability and transparency of village funds affect the level of community trust

PENDAHULUAN

Pasca orde baru, Indonesia mengalami banyak perubahan khususnya dalam sistem pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia menganut sistem sentralistik, namun seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah saat ini menganut sistem desentralisasi fiskal, dekonsentrasi, dan tugas pembangunan. Hal ini sesuai dengan Tap MPR Nomor: XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta perimbangan kekuasaan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketetapan MPR tersebut menjadi landasan dikeluarkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Mardiasmo, 2002).

Dengan adanya undang-undang tersebut, pemerintah diberi kewenangan dan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab dalam penerapannya. Pemerintah Pusat memberikan kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk membangun daerah yang mandiri dengan tujuan agar setiap daerah mampu menghasilkan kualitas kinerja dalam pengelolaan sumber daya daerah secara efisien dan efektif dan mengembangkan potensi atau keunggulan yang dimiliki daerah tersebut. Effendi (2006) menyatakan hasil dari pengelolaan sumber daya daerah oleh masing-masing pemerintah daerah akan dilaporkan dalam bentuk laporan akuntabilitas atau laporan pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik.

Menurut Mardiasmo (2002) akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Lebih lanjut Mardiasmo (2012) mendefinisikan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban yang penting atas segala aktivitas kegiatan dan harus bisa dipertanggungjawabkan kepada pihak yang memberi amanah. Pemerintah merupakan wakil rakyat/masyarakat atau pihak yang diberi amanah oleh masyarakat. Jika pemerintah menjalankan amanah dengan baik, masyarakat akan percaya kepada pemerintah. Kepuasan dan kepercayaan masyarakat merupakan hal yang penting dalam suatu kehidupan bernegara karena pemerintah tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik tanpa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (Halimatussa'diyah, 2012). Apabila kinerja pemerintah baik maka masyarakat akan menaruh kepercayaan yang besar kepada pemerintah dan sebaliknya apabila kinerja pemerintah buruk maka kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan menurun. Jadi kinerja pemerintah berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (Fard & Rostamy, 2007).

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. (Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2002).

Di Indonesia, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan penyelenggara negara cenderung mengalami kemunduran bahkan ada yang menyatakan mereka tidak perlu lagi adanya pemerintahan (Daniprawiro, 2013). Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yaitu karena adanya kesenjangan ekspektasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah dengan kinerja pemerintah sesungguhnya (Nye,dkk, 1997 dalam Welch, dkk, 2004). Grosso dan Gregg (2011) menyatakan bahwa salah satu cara untuk mencapai kepuasan masyarakat adalah penyediaan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat yang dapat dilakukan dengan membuat laporan keuangan dan kinerja pemerintah.

Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Suryanto, 2014). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan desa, perlu adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (Good Governance). Salah satu unsur utama dari Good Governance adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah bentuk tanggungjawab pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodic. Jadi, akuntabilitas pemerintah sangat dibutuhkan sebagai penunjang penerapan otonomi desa agar dapat berjalan dengan baik. Selain akuntabilitas untuk pelaksanaan pemerintah yang baik juga di perlukan adanya unsur transparansi. Transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintah maupun dalam penyelenggaraan perusahaan yang baik (Good governance). Transparansi ditandai oleh apakah kebijakan, regulasi, program, anggaran, dan kegiatan pemerintah terbuka pada publik. Sulistyani. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004),h.16

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi dana desa terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Manfaat teoritik dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang konsep akuntabilitas dan transparansi dana desa khususnya berkenaan dengan pengelolaan keuangan public. Manfaat praktis bagi penulis yaitu menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman secara mendalam mengenai akuntabilitas dan transparansi dana desa sementara bagi Pemerintah Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang positif dan konstruktif bagi pemerintah daerah/kabupaten dan pemerintah desa dalam rangka memberikan dan menyempurnakan kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan dan yang akan datang. Pengertian Akuntabilitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu kegiatan pertanggungjawaban. Menurut Ensiklopedia Administrasi, Akuntabilitas adalah kesadaran seorang pejabat untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya bagi diri sendiri tanpa melihat ada atau tidak ada pejabat atasannya.

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban bagi pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (pincipal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk menerima pertanggungjawaban tersebut.

Dari kedua pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari pemegang amanah untuk mengelola, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas yang berkaitan dengan amanah tersebut kepada pemberi amanah. Adanya akuntabilitas dapat sebagai sarana/bukti bahwa suatu amanah sudah dikerjakan atau dilaksanakan dengan baik. Akuntansi sektor publik dituntut dapat menjadi alat perencanaan dan pengendalian organisasi sektor publik secara efektif dan efisien, serta memfasilitasi terciptanya akuntabilitas publik. Adapun indikator Akuntabilitas dibagi menjadi lima yaitu:

Adapun indikator Akuntabilitas dibagi menjadi lima yaitu:

1) Proses pembuatan sebuah keputusan yang dibuat secara tertulis, tersedia bagi warga yang membutuhkan, dengan setiap keputusan yang diambil sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, dan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar.

2) Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.

3) Kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil dan dikomunikasikan.

4) Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media masa akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat.

5) Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil.

Transparansi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kenyataan dan kejelasan (jelas). Transparansi berarti suatu keterbukaan secara nyata, menyeluruh, dan memberi ruang kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Apabila dikaitkan dengan anggaran, transparansi dapat didefinisikan sebagai keterbukaan kepada masyarakat yang meliputi fungsi dan struktur pemerintah, tujuan kebijakan fiskal, sektor keuangan publik, dan proyeksi-proyeksinya.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah kepada publik tentang semua informasi yang berkaitan dengan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan. Adanya transparansi anggaran membawa dampak positif bagi kepentingan publik. Beberapa manfaat penting adanya transparansi anggaran yaitu dapat mencegah terjadinya korupsi, mudah dalam mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan, meningkatkan akuntabilitas pemerintah sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah, meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu, menguatkan kohesi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk, dan menciptakan iklim investigasi yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan kepastian usaha.

Transparansi dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik adalah terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima kebutuhan pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi secara konseptual, transparansi dalam penyelenggaraan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti oleh semua penerima kebutuhan pelayanan.

Transparansi dibangun dalam suasana adanya aliran informasi yang bebas. Dalam suasana ini, proses, institusi, dan informasi dapat secara langsung di akses oleh mereka yang berkepentingan. Di samping itu, juga tersedia cukup informasi untuk memahami dan memonitor ketiga hal itu. Menurut Riswandha dalam *Desentralisasi, Demokratisasi, dan Pembentukan Good Governance.*” Jurnal Otonomi Daerah menyebutkan bahwa transparansi adalah rakyat paham akan keseluruhan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi, transparansi itu berarti bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

Transparansi mensyaratkan bahwa pelaksana pelayanan publik memiliki pengetahuan tentang permasalahan dan informasi yang relevan dengan yang kegiatan pelayanan.

Transparansi dapat diukur dengan beberapa indikator, indikator transparansi yaitu: 1. Ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi. 2. Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran, 3. Adanya audit yang independen dan efektif, 4. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran.

Adapun hipotesis dalam penelitian ini yang akan diuji ialah:

H1: Terdapat pengaruh akuntabilitas dana desa terhadap tingkat kepercayaan masyarakat Punia Kota Mataran NTB

Ho1: Tidak terdapat pengaruh akuntabilitas dana desa terhadap tingkat kepercayaan masyarakat Punia Kota Mataran NTB

H2: Terdapat pengaruh transparansi dana desa terhadap tingkat kepercayaan masyarakat Punia Kota Mataran NTB

Ho2: Tidak terdapat pengaruh transparansi dana desa terhadap tingkat kepercayaan masyarakat Punia Kota Mataran NTB

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kuantitatif karena penelitian semacam ini didasarkan pada aspek-aspek esensial, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian guna untuk mengetahui terkait pengaruh akuntabilitas dan transparansi dana desa terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Dengan penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala (Sugiyono, 2013:37). Penelitian ini di lakukan di kelurahan Punia Kota Mataran sebagaimana yang telah di paparkan di latar belakang diatas apakah pengaruh akuntabilitas dan transparansi dana desa terhadap tingkat kepercayaan masyarakat.

Penelitian ini memiliki dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui masyarakat sebagai responden dan onjek penelitian dengan proses kuesioner serta pengamatan yang dilakukan secara langsung di lapangan. Sedangkan data sekunder yaitu berupa data tidak langsung yang berupa catatan-catatan atau dokumen yang berupa tulisan, laporan media online maupun berita ditemukan dalam penelitian maupun studi kepustakaan (Ibid, 122).

Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data melalui angket, angket merupakan daftar pertanyaan yang diberikan kepada peserta untuk memberikan informasi dan respon sesuai dengan permintaan yang terdaftar (Tsai et al., 2020). Analisis data kuantitatif digunakan untuk meneliti variabel-variabel penelitian, dengan memberikan kuesioner kepada

masyarakat di kelurahan Punia Kota Mataram. Jenis kuesioner yang diberikan berupa kuesioner tertutup dengan jawaban yang disediakan menggunakan skala likert.

Sampel merupakan bagian dari kuantitas dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Salminen et al., 2020). Dengan metode pengambilan sampel ini diharapkan hasilnya dapat cenderung lebih mendekati nilai aslinya dan diharapkan dapat memperkecil terjadinya kekeliruan terhadap nilai populasi (Usman & Akbar, 2008). Rumus yang dikembangkan oleh Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

N: Sampel size

N: Population

e: Toleransi Kesalahan (sampling error)

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

$$n = \frac{6.884}{1 + 6.884 \cdot (0,1^2)}$$

$$n = \frac{6.884}{1 + 6.884 \cdot (0,01)}$$

$$n = 99,9$$

Jadi, sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 99,9 responden dan untuk memudahkan peneliti sehingga dibulatkan menjadi 100 responden. Analisis data merupakan kegiatan setelah mengumpulkan data baik dari responden ataupun narasumber lainnya. Penelitian ini menggunakan 3 tehnik analisis data yang di antaranya uji validitas, uji reabilitas dan uji hipotesis. Dimana dari ketiga tehnik analisis data tersebut dapat diketahui apakah akuntabilitas dan transparansi dana desa berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat khususnya masyarakat di kelurahan Punia Mataram.

HASIL DAN DISKUSI

Kelurahan Punia merupakan satu dari 9 (sembilan) kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Mataram dengan luas wilayah,87.52 Ha/m2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 Sebelah Utara : Kelurahan Mataram Barat . Sebelah Timur : Kelurahan Mataram Timur . Sebelah Selatan : Kelurahan Pagesangan Timur . Sebelah Barat : Kelurahan Kekalik Jaya. Letak Kelurahan Punia yang tepat berada di pusat Kota Mataram cukup memberikan kemungkinan bagi berkembangnya seluruh aktifitas masyarakat dalam berbagai bidang, baik usaha ekonomi produktif, home industri, perkantoran,perdagangan dan jasa.

Jumlah penduduk Kelurahan Punia Tahun 2018 berjumlah 6.884 jiwa dan Kepala Keluarga (KK) 2.044 orang. Bila dilihat dari komposisi penduduk menurut agama, bahwa di Kelurahan Punia mayoritas beragama Islam. Didalam kerukunan umat beragama tetap dijaga dan terpelihara oleh seluruh komponen masyarakat Kelurahan Punia dalam suasana kehidupan yang damai dan harmonis.

Secara administrasi dan Pemerintahan Kelurahan bekerjasama secara terintegrasi dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pelayanan Masyarakat dengan Lembaga-lembaga yang ada di Kelurahan seperti misalnya Kepala Lingkungan dan Dinas/Instansi terkait, sehingga kegiatan-kegiatan yang menyangkut masalah pemerintahan berjalan secara sinergi. Dari hasil data yang telah di kumpulkan dan di Analisa terkait apakah terdapat pengaruh antara akuntabilitas dan transparansi dana desa terhadap tingkat kepercayaan masyarakat.

Uji Validitas

Validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur yang dipergunakan untuk mengukur apa yang di ukur. Pengujian validitas dilakukan dengan bantuan computer menggunakan program IBM SPSS Statistics 21. Dalam penelitian ini pengujian validitas hanya dilakukan terhadap 35 responden. Pengambilan keputusan berdasarkan pada nilai r hitung (corrected Item-total correlation) > r tabel dengan r tabel 0,334, untuk $df = 35 - 2 = 33$.

Correlations

		akuntabi litas	transpar ansi	kepercay aan masyarak at
AkuntabilitasX1	Pearson Correlation	1	1.000**	1.000**
	Sig. (2- tailed)		.000	.000
	N	36	36	36
Transparansi(X2)	Pearson Correlation	1.000**	1	1.000**
	Sig. (2- tailed)	.000		.000
	N	36	36	36
kepercayaan masyarakat	Pearson Correlation	1.000**	1.000**	1
	Sig. (2- tailed)	.000	.000	
	N	36	36	36

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan hasil uji validitas di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh akuntabilitas(X1) dan transparansi(X2) dana desa terhadap tingkat kepercayaan masyarakat di Kelurahan Punia Kota Mataram. Semua variabel yang terdapat di X1,X2 dan Y dinyatakan valid karena r hitung $>$ r tabel (r tabel = 0,334) sehingga pernyataan tersebut bisa digunakan dalam penelitian. Hal ini ditandai dengan tanda * atau ** pada kolom total di table output.

Uji Reabilitas

Uji reabilitas dilakukan terhadap item pernyataan yang dinyatakan valid. Suatu variabel dikatakan reliabel atau handan jika jawaban terhadap pertanyaan selalu konsisten. Koefisien reabilitas instrument dimaksudkan untuk melihat konsistensi jawaban dari butir-butir pernyataan yang diberikan oleh responden. Hasil reabilitasnya di hitung dengan menggunakan rumus "Alpha Cronbach" dimana suatu variabel dikatakan dapat diandalkan (reliabel) apabila nilai Cronbach,s Alpha $>$ 0,600 (Ghozali,2016) serta perhitungan dibantu computer program SPSS.

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	36	97.3
	Excludeda	1	2.7
	Total	37	100.0

Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronba	N of
ch's Alpha	Items
.996	3

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa instrumen akuntabilitas dan transparansi menunjukkan angka Cronbach,s Alpha 0,996 $>$ 0,600 yang berarti kedua instrument tersebut dinyatakan dapat di andalkan (reliable).

Uji Hipotesis

Uji t

Teknik uji t ini digunakan untuk menguji untuk apakah semua variabel bebas yang ada pada model secara individual mempunyai pengaruh yang signifikan pada model secara individual. Uji statistik t merupakan pengujian secara parsial apakah terdapat pengaruh variabel akuntabilitas dan transparansi terhadap kepercayaan masyarakat di Kelurahan Punia Kota Mataram. Jika hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai signifikan (sig) $<$ alpha 0,05

maka terdapat pengaruh. Sedangkan jika nilai signifikan (sig) > alpha 0,05 maka tidak terdapat pengaruh. Berikut disajikan hasil penelitian uji t.

Hasil uji t

Coefficientsa

Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.
	Coefficients				
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.001	.352		.0398	.9
akuntabilitas	.488	.080	.595	6.095	.000
transparansi	.400	.097	.405	4.145	.000

a. Dependent Variable: kepercayaan masyarakat

Berdasarkan hasil uji t di atas, maka dapat dilihat pada penjelasan berikut:

1) Nilai (sig) untuk variabel variabel akuntabilitas (X1) sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari nilai α 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat.

2) Nilai (sig) dari variabel transparansi (X2) sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari nilai α 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial transparansi berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat.

Uji F

Pengujian penelitian ini menggunakan teknik uji F dengan metode uji Anova yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Uji F ini digunakan untuk mengetahui apakah secara simultan koefisien variabel bebas mempunyai pengaruh nyata atau tidak terhadap variabel terikat.

Uji F ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel akuntabilitas (X1) dan transparansi (X2) secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat (Y). Keputusan dari uji F ini bisa didapatkan dengan membandingkan antara nilai sig dengan taraf signifikan (α) sebesar 5 % atau 0,05. Jika nilai sig kurang dari 0,05, maka variabel akuntabilitas dan transparansi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Berikut disajikan hasil dari penelitian uji F.

Hasil uji F

ANOVAa

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Significance
Regression	13234.09673	2	6617.04837	1659.93347	.000b
Residual	131.549	33	3.986		
Total	13235.41222	35			

a. Dependent Variable: kepercayaan masyarakat
Predictors: (Constant), transparansi, akuntabilitas

Berdasarkan tabel diatas diperoleh hasil uji F (Anova) nilai signifikan sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas (X1) transparansi (X2) secara Bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat (Y).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel akuntabilitas berpengaruh terhadap variabel kepercayaan masyarakat di Kelurahan Punia Kota Mataram melalui uji validitas, reabilitas dan uji hipotesis yang menunjukkan bahwa data responden yang telah di uji menunjukkan hasil valid atau reliable sehingga H1 diterima .

2. Variabel transparansi berpengaruh terhadap variabel kepercayaan masyarakat di Kelurahan punia Kota Mataram. Hal tersebut dibuktikan melalui uji validitas, reabilitas dan uji hipotesis yang menunjukkan bahwa data responden yang telah di uji menunjukkan hasil valid atau reliable sehingga H2 diterima

REFERENSI

Arif Widyatama, dkk. Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD), Jurnal: BAKI, Volume 2, Nomor 2, 2017

Arim Nasim & Muhammad Rizqi Syarhi Romadhon. Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan Pengelolaan Zakat dan Sikap Pengelola Terhadap kepercayaan Muzzaki, Jurnal: Riset Akuntansi Keuangan Vol, 2, No3, 2014

Baiq Nurrikszianan, dkk. Determinasi Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implikasinya Terhadap Kepercayaan Public-Stakeholder. *Jurnal: Akuntansi dan Investasi*, Vol 18, No.1, 2017

Loina Lalolo Krina P. Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003

Mardiasmo. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset, 2002
Mualifu, dkk. Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemernitah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. *Jurnal: Journal of Economic, Business and Engineering* Vol. 1, No. 1, Oktober 2019

Zitri, I., Gushadi, A., & Subandi, A. (2023). Pariwisata Halal Di Nusa Tenggara Barat: Implementasi Dalam Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. *Journal Of Social And Policy Issues*, 113-120.

Zitri, I., Lestanata, Y., & Pratama, I. N. (2020). Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Obyek Wisata Berbasis Masyarakat (Community Based Toursm) (Studi Kasus Pulau Kenawa Di Desa Poto Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat). *Indonesian Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan*, 3(2).

Zitri, I., Lestanata, Y., Darmansyah, D., Amil, A., & Umami, R. Inovasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Sistem Zero Waste Di Nusa Tenggara Barat Model Pentahelix. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(1), 107-119.

Ibrahim, I., & Zitri, I. (2023). Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Kawasan Pertambangan Emas Di Sumbawa Barat. *Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan Dan Inovator Pendidikan*, 10(1), 87-96.

Astuti, P., Ashari, W. K., Ouktafia, F., Wahyudi, D., Jailani, M. A., & Zitri, I. (2023). Strategi Peningkatan Daya Tarik Di Destinasi Tanjung Bias Desa Senteluk Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Paradigma (Jp)*, 12(2).